

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering (Expanded Edition)*. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang. (2025). *Profil DPMPTSP Kota Semarang*.
- Dye, T. R. (2001). *Understanding Public Policy* (10th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Kurniasari, D., & Sulandari, S. (2017). Inovasi Pelayanan Publik Melalui Teknologi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 103–110.
- Mahendrardi, A. *Pemanfaatan E-Government Berbasis Website dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus DPMPTSP Kota Semarang)*. Skripsi.
- Mulyadi. (2016). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kolaborasi. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 3(1), 1–12.
- Parsons, W. (2003). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Kota Semarang. (2016). Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.
- Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Data UMKM Kota Semarang*. Diakses dari data.semarangkota.go.id
- Pemerintah Kota Semarang. (2025). *Profil Kota Semarang*. Diakses dari semarangkota.go.id
- Peterson, G. E. (1981). *Financing Local Government in Indonesia*. Washington DC: World Bank.
- PPID Kota Semarang. (2025). *Informasi Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan*. Diakses dari izin.semarangkota.go.id
- Purnamasari, A. (2018). *Pemanfaatan Aplikasi Ijus Melon di Kota Semarang*.
- Putri, N. D. A., & Mutiarin, D. (2018). Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 101–112.
- Renaldhy, D. A. S. *Penerapan Sistem Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang*. Skripsi.
- Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- Safitri, A. F. Efektivitas Aplikasi Jakarta Evolution Dalam Pelayanan Perizinan Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Skripsi.
- Samudra, W. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik: Konsep, Strategi dan Aplikasi. Yogyakarta: Liberty.
- Sinambela, L. P. (2011). Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sururi. (2016). Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 2(2), 65–72.
- Sururi. (2017). Inovasi dalam Organisasi Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 4(1), 78–90.
- Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusniah, A. Pengembangan Perizinan Kota dengan Inovasi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Semarang dan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah). Skripsi.